

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Sementara pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah tersebut. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset daerah tersebut adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Rudy Badrudin (2012:97) adalah instrument yang kebijakan utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar evaluasi kinerja, alat bantu untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dan unit kerja.

Suatu sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah pemerintahan di era otonomi daerah yang terkait dengan pengelolaan APBD perlu ditetapkan standar atau acuan kapan suatu daerah dikatakan mandiri, efektif dan efisien serta

akuntabel. Fenomena pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah pemerintah ini, paradigmanya ini berapa yang kita anggarkan itu yang harus kita belanjakan atau habiskan, padahal tidak harus demikian dan itu masih berlanjut sampai sekarang, seharusnya seluruh pada pendapatan ini tidak mesti jumlah angka belanjanya tidak harus sama dengan yang telah ditentukan atau ditetapkan pada realisasinya. Fenomena inilah yang menjadi alasan penulis untuk mengangkat judul ini.

Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Palembang menghitung kinerja keuangannya dengan menggunakan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan). Setiap organisasi/perangkat daerah menyusun LKI (Laporan Kinerja Instansi) dulunya LAKIP (Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintahan) yang di nilai oleh inspektorat. Laporan itu dibuat dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun RKT (Rencana Kerja Tahunan) dalam RKT itu sudah terdapat target dan indikatornya.

Dalam rangka pertanggung jawaban publik, pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (*value for money*) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengalaman yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan daerah masih memprihatinkan pada anggaran daerah. Khususnya pengeluaran daerah yang belum mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju pembangunan di daerah. Disisi lain banyak ditemukan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kala prioritas dan kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, karena kualitas perencanaan anggaran

juga diikuti dengan ketidakmampuan pemerintah daerah secara berkesinambungan. Untuk itu diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. Pengukuran kinerja keuangan yang digunakan salah satunya adalah dengan menggunakan metode *value for money*.

Dibawah ini dapat dilihat Laporan Anggaran dan Realisasi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang Pada Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah sebagai berikut :

Tabel 1.1.

Laporan Anggaran dan Realisasi

Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Tahun 2014-2018

Tahun	Pendapatan		%	Belanja		%
	Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
2014	3.082.206.627.931,31	2.929.034.491.604,27	95,03	3.153.733.368.049,39	2.812.465.373.360,45	89,18
2015	2.870.202.481.055,85	2.871.899.610.866,10	100,06	3.146.444.216.003,47	2.868.750.360.468,10	91,71
2016	3.466.134.113.873,28	3.122.903.127.195,01	91,43	3.368.364.428.760,18	2.914.627.987.631,23	86,53
2017	3.578.989.385.107,80	3.417.593.733.021,39	71,25	3.383.208.534.684,50	3.141.848.658.597,72	92,86
2018	3.952.034.936.055,46	3.485.838.163.849,88	88,06	3.995.571.467.222,82	3.488.199.694.565,12	87,30

“Sumber: BPKAD Kota Palembang, 2019”.

Berdasarkan Tabel 1.1. dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah dari tahun ke tahun mengalami naik turun. Pendapatan pada tahun 2014 terealisasi sebesar 95,03% dan belanja terealisasi sebesar 89,18%. Realisasi pendapatan pada tahun 2015 mengalami kenaikan dibandingkan realisasi sebelumnya sebesar 100,06% dan belanja daerah terealisasi sebesar 91,71%.

Kemudian realisasi pendapatan pada tahun 2016 sebesar 91,43% mengalami penurunan dan realisasi belanja sebesar 86,53%. Realiasi pendapatan pada tahun 2017 adalah sebesar 71,25% dan belanja terealisasi sebesar 92,86%. Selanjutnya realisasi pendapatan pada tahun yang terakhir yaitu tahun 2018 sebesar 88,06% dan realisasi belanja sebesar 87,30%.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul yaitu :

“ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE *VALUE FOR MONEY* PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) PALEMBANG”.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah :

“Bagaimana kinerja keuangan dengan menggunakan metode *Value For Money* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Palembang?”

1.3. Tujuan Penelitian

Dari masalah penelitian diatas maka tujuannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan dengan menggunakan metode *Value For Money* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Palembang periode 2014-2018.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut.

1.4.1. Bagi Penulis

Hasil Penelitian ini memberi dan menambah wawasan belajar untuk mengetahui kinerja keuangan dengan menggunakan metode *Value For Money* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Palembang.

1.4.2. Bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Palembang

Hasil penelitian ini menjadi salah satu masukan dan pertimbangan mengenai pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan metode *Value For Money* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Palembang.

1.4.3. Bagi Universitas Bina Darma Palembang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi referensi ilmu pengetahuan untuk mahasiswa bina darma dan bagi peneliti dimasa yang akan datang.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan membahas tentang analisis kinerja keuangan dengan menggunakan metode *Value For Money* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Palembang periode 2014-2018.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal penelitian ini dijabarkan dalam suatu sistematika pembahasan, guna memberikan suatu gambaran yang jelas tentang penulisan ini. Sistematika penulisan skripsi yang akan dibagi menjadi beberapa bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan diuraikan tinjauan pustaka yang mencakup kerangka teori dan konsep tinjauan, kerangka berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan metode penelitian yang berisi tentang ruang lingkup penelitian, indikator, teknik pengambilan data, dan teknik analisis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan tentang perhitungan dan pembahasan dalam mengambil evaluasi perhitungan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Palembang.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis untuk mencoba mengambil keputusan berdasarkan uraian pada bab terdahulu dan mencoba memberikan saran-saran untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Palembang.

DAFTAR PUSTAKA